

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, ada dua jenis utama lembaga keuangan di Indonesia: lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, ini memiliki peran mendasar dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Lembaga keuangan perbankan meliputi bank umum, bank persepsi, dan bank syariah, sementara lembaga keuangan non-bank mencakup berbagai entitas seperti lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Di samping itu, ada pula lembaga keuangan khusus yang berfokus pada pelayanan di tingkat lokal, sejumlah lembaga, antara lain Lembaga Pith Nagari (LPN) Sumatera Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah, dan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Jawa Barat, telah berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian lokal di berbagai daerah (Sadiartha, 2017). Setiap desa adat atau desa pekraman di Provinsi Bali memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memiliki fungsi serupa. Di Provinsi Bali, LPD merupakan lembaga keuangan mikro. LPD didirikan atas dasar kekeluargaan dan berfungsi dalam batas wilayah administratif desa adat atau desa pekraman. Selama bertahun-tahun, LPD, lembaga keuangan mikro pedesaan yang didirikan khusus di Bali, telah memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi desa.

Bali bukan hanya dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga dengan kekayaan budaya yang menjadi salah satu sumber daya ekonominya. Namun, seperti halnya sumber daya alam, keberlangsungan sumber daya ekonomi ini memerlukan pemeliharaan yang tepat. Dalam konteks Bali, pemeliharaan kekayaan budaya, terutama di desa pakraman, menjadi tanggung jawab utama masyarakat setempat. Masyarakat adat memerlukan lembaga keuangan yang mampu menopang perekonomiannya guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Khususnya Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 keduanya mengakui keberadaan atau keabsahan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka inisiatif ini dilakukan. LPD didirikan di setiap desa adat. Sejak didirikannya, LPD telah memainkan peran yang penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat desa, mendorong usaha kecil dan menengah, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, serta mendukung pembangunan di wilayah desa.

Dalam struktur organisasinya, LPD dipimpin oleh pengurus yang dipilih dari kalangan anggota desa adat, mencerminkan semangat partisipatif dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Melalui model ini, LPD tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi lokal mereka. Sebagai suatu lembaga yang menadi penyimpanan kekayaan desa, LPD menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan membantu memperkuat ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan demikian, kecuali apabila ada keinginan lain mengenai jumlah pinjaman atau bantuan keuangan, LPD bertujuan untuk menyediakan berbagai produk jasa keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman khusus kepada penduduk desa, dan menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya sampai dengan 100% dari modal, termasuk cadangan dan laba ditahan (LPLPDK, 2024). Dengan terus berkembang dan menunjukkan kontribusinya dengan kinerja yang baik LPD terus menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi pedesaan, menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro tersebut. Kinerja yang baik dan sukses terjadi ketika tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara memuaskan. Pandangan menyeluruh tentang kondisi perusahaan selama periode waktu tertentu termasuk dalam kinerja perusahaan, yang dipengaruhi oleh bagaimana organisasi menggunakan sumber dayanya saat ini. Dengan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, kata "kinerja" umumnya digunakan untuk menggambarkan setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan organisasi selama periode waktu tertentu.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian desa adat dan keberlanjutan budaya lokal. Sebagai lembaga keuangan khas yang berlandaskan nilai-nilai adat dan tradisi Bali, LPD tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kegiatan adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa LPD di Bali dilaporkan mengalami kendala serius seperti kebangkrutan, kredit macet yang tinggi, dan penurunan kinerja keuangan. Oleh karena itu, menilai kinerja keuangan LPD menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya sekaligus memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Kinerja Keuangan sebuah perusahaan dianggap baik jika tingkat profitabilitasnya tinggi atau optimal, yang sering kali diukur dengan membandingkan laba perusahaan dengan berbagai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Laba sendiri merupakan hasil dari pendapatan penjualan setelah dikurangi dengan beban-beban yang ada. Dengan memperhatikan profitabilitas, kita dapat menilai apakah sebuah perusahaan telah mencapai kinerja yang baik atau sebaliknya (Priatna, 2016). Profitabilitas sebagai alat untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Meningkatnya profitabilitas merupakan salah satu tujuan dari setiap perusahaan. Profitabilitas sebuah perusahaan mencerminkan kemampuannya dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang dimiliki. Cara menilai profitabilitas suatu perusahaan dapat bervariasi, tergantung pada metrik yang digunakan untuk membandingkan laba dengan aset atau modal lainnya.

Kinerja inti suatu usaha tercermin dari profitabilitas yang mengukur seberapa baik kegiatan usaha tersebut menghasilkan laba (Harmono, 2014). Menurut (Kasmir, 2019), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kapasitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan ukuran seberapa baik pengelolaan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba; semakin besar laba yang diperoleh suatu organisasi, maka semakin baik pula kinerjanya.

Rasio profitabilitas terdiri dari sejumlah metrik yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, seperti margin laba kotor, daya perolehan dasar, margin laba operasi, margin laba bersih, laba atas ekuitas (ROE), laba atas aset (ROA), laba bersih, rasio pertumbuhan, dan rasio pertumbuhan penjualan bersih, menurut penelitian (D. Wijaya & Pakpahan, 2021).

Tabel 1. 1
Data Jumlah LPD Per Kabupaten/Kota Se Bali Tahun 2023

Kabupaten	Desa Adat	LPD
Kabupaten Jembrana	64	64
Kabupaten Tabanan	349	311
Kabupaten Badung	122	122
Kabupaten Gianyar	273	270
Kabupaten Klungkung	122	119
Kabupaten Bangli	168	159
Kabupaten Karangasem	190	190
Kabupaten Buleleng	170	169
Kota Denpasar	35	35
Total	1493	1439

Sumber: Data dari Pemerintah Provinsi Bali (Satu Data Indonesia Provinsi Bali)

LPD Bali berkembang sangat cepat. Menurut informasi yang tercantum di laman web resmi LPD Bali semenjak berdirinya LPD ditahun 1984 hanya tercatat 8 LPD sampai Desember tahun 2023 tercatat 1.439 LPD yang telah beroperasi di 1.493 desa adat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali, termasuk Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar. LPD di Bali memperlihatkan kinerjanya dengan menunjukkan total aset dari semua LPD di Bali hingga Desember 2023 mencapai 25 Triliun. Sementara itu, laba yang berhasil dihasilkan oleh LPD Provinsi Bali hingga Desember 2023 mencapai sekitar 560 miliar (BKS-LPD Provinsi Bali, 2023). Setelah dianalisis dari data yang didapatkan terlihat bahwa tidak semua desa adat di kabupaten/kota se Bali memiliki LPD. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu LPD yang memiliki jumlah LPD sama dengan jumlah desa adatnya. Dapat dilihat bahwa dari total 190 desa adat di Karangasem terdapat 190 LPD, itu mendemonstrasikan bahwa semua desa adat memiliki LPD. Hal ini menunjukkan tingginya keinginan dan dorongan dari desa-desa adat di Karangasem untuk mengembangkan perekonomian mereka melalui LPD.

Kehadiran LPD di setiap desa adat menandakan kesadaran dan komitmen dari masyarakat setempat dalam memajukan sektor keuangan mikro di wilayah mereka. Ini juga mencerminkan pentingnya peran LPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi penduduk desa. Namun demikian kontribusi Kabupaten Karangasem relatif kecil dibandingkan dengan total LPD di Bali, dengan total laba sebesar 17 juta dan total aset sebesar 1,1 miliar pada bulan Desember 2023 (Laporan Keuangan LPLPD Karangasem, 2023), LPD Karangasem menyumbang sebagian kecil dari total laba dan aset LPD di Provinsi Bali. Jika kita membandingkan jumlah laba LPD Karangasem dengan total laba LPD Provinsi Bali, maka persentasenya adalah sekitar 3% dari total laba yang dihasilkan oleh LPD di seluruh provinsi. Demikian pula, jika kita membandingkan total aset LPD Karangasem dengan total aset LPD Provinsi Bali, persentasenya adalah sekitar 10% dari total aset yang dimiliki oleh LPD di provinsi tersebut. Kontribusi yang relatif kecil tentunya terjadi karena berbagai macam faktor tantangannya, adapun salah satu tantangan yang dihadapi LPD di Kabupaten Karangasem, termasuk di Kecamatan Selat, adalah adanya penurunan kinerja yang terjadi di setiap LPD di desa adat.

Kecamatan Selat, yang terletak di Kabupaten Karangasem, memiliki potensi ekonomi yang sangat menonjol. Dengan kondisi geografis dan sosial yang mendukung, wilayah ini menjadi tempat yang ideal bagi perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Potensi pariwisata yang kuat, ditandai dengan keindahan alam seperti Gunung Agung, Bukit Surga, dan Air Terjun Jagasatru, memberikan peluang ekonomi yang besar bagi penduduk lokal. Selain itu, keberadaan desa-desa adat yang kaya akan budaya Bali menjadi landasan kuat bagi aktivitas ekonomi desa dan menjadi pondasi penting bagi usaha mikro dan kecil. Sektor pertanian, dengan produk unggulan seperti salak dan kelapa, juga menjadi kekuatan utama di wilayah ini. LPD di setiap desa memainkan peran penting dalam mendukung pertanian dengan menyediakan dukungan keuangan bagi petani dan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian mereka. Di samping itu, potensi industri kreatif, seperti kerajinan tangan dan seni, juga dapat diberdayakan oleh LPD melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, LPD di kecamatan Selat memiliki peran strategis dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi potensial.

Tabel 1. 2
Perkembangan Aset, Pendapatan Bersih, Biaya dan Beban, dan Laba Bersih LPD di Kecamatan Selat Periode 2020-2023

Tahun	Asset	Pendapatan Oprasional	Biaya Dan Beban Oprasional	Laba Bersih	Persentase Penurunan Laba %	ROA
2020	300,394,272	30,307,795	25,456,274	4,851,521		1.62%
2021	271,357,861	26,590,812	22,071,580	4,519,232	68,4%	1.67%
2022	278,309,245	26,484,859	21,994,177	4,490,682	64,1%	1.61%
2023	317,237,823	27,923,158	23,181,608	4,741,550	42,3%	1.49%

Sumber: LPLPD Karangasem (*Laporan Keuangan LPD Se Kecamatan Selat*)

Kecamatan Selat, yang menjadi fokus penelitian, merupakan salah satu wilayah yang tengah mendorong pembangunan, termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, kecamatan ini sangat berharap akan perkembangan LPD sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi lokal. Salah satu LPD di Kecamatan Selat, seperti LPD Duda dan LPD Sogra, selama ini sudah menunjukkan potensinya dengan baik karena kedua LPD ini merupakan penyumbang aset LPD terbesar di Kabupaten Karangasem (LPLPDK Karangasem). Di Kecamatan Selat, terdapat 27 LPD yang tersebar di setiap desa adat Pakraman. Total aset yang dimiliki oleh LPD se Kecamatan Selat hingga akhir tahun 2023 mencapai sekitar 317 juta, sementara total laba yang berhasil dihasilkan hingga akhir tahun yang sama adalah sekitar 4,7 juta. Namun, dari data tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya sebuah fenomena pada kedua indikator yang mengalami penurunan seiring waktu. Pertumbuhan aset LPD dari akhir tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 mengalami fluktuasi, sementara pertumbuhan laba mengalami penurunan. Dalam analisis keuangan, laba sering kali dianggap sebagai salah satu ukuran kunci dari kinerja suatu perusahaan. Laba menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah memperhitungkan semua biaya dan beban yang terkait dengan operasi bisnisnya. Penurunan kinerja perusahaan bisa tercermin dari penurunan laba, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan penjualan, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya efisiensi operasional (Andi Ahmad, 2018). Walaupun

Kecamatan Selat memperlihatkan potensi ekonomi yang kuat, tidak dapat disangkal bahwa terdapat fenomena penurunan kinerja yang dialami oleh setiap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adatnya.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu metrik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan LPD. Return On Assets (ROA) menurut (Kasmir, 2019) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) dari jumlah aset yang digunakan oleh perusahaan. Lebih jauh, ROA menawarkan indikator profitabilitas perusahaan yang lebih akurat karena menunjukkan seberapa baik manajemen menggunakan operasi untuk menghasilkan pendapatan. Karena dapat memperhitungkan kapasitas manajemen untuk mencapai profitabilitas dan efisiensi manajerial secara keseluruhan, maka ROA dipilih. Karena setiap aktivitas yang sedang berjalan dapat menghasilkan laba, maka angka ROA yang mendekati 1 menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin membaik. Dengan kata lain, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka semakin tinggi angka ROA. Kapasitas modal yang ditanamkan pada seluruh aset yang dimiliki untuk menciptakan laba ditunjukkan dengan penggunaan ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi return on asset (ROA) Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka semakin besar laba yang diperoleh LPD, maka semakin baik kinerja keuangannya, dan semakin baik pula posisinya dalam menggunakan asetnya.

Berdasarkan tabel 2, dapat terlihat bahwa Return on Assets (ROA) pada LPD Kecamatan Selat dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada periode 2020-2021, ROA mengalami peningkatan dari 1,62% menjadi 1,67%. Namun, pada periode 2021-2022, ROA mengalami sedikit penurunan menjadi 1,61%, dan penurunan lebih lanjut terjadi pada periode 2022-2023, di mana ROA turun menjadi 1,49%. Secara garis besar, ROA pada LPD Kecamatan Selat dalam periode 2021-2023 mengalami penurunan, menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan selama periode tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat laba yang setiap tahun menurun dan aset yang berfluktuasi, meskipun ROA sempat mengalami sedikit peningkatan pada periode 2020-2021. Namun setelah itu, ROA mengalami penurunan dari 2021 hingga 2023, dengan penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2023.

Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan selama periode tersebut. Berdasarkan laporan keuangannya, kinerja keuangan LPD di Kabupaten Selat tergolong buruk, terbukti dari asetnya yang terlalu besar jika dibandingkan dengan keuntungannya. Kinerja LPD Kabupaten Selat mengalami penurunan yang cukup rendah akibat ketidakmampuannya dalam mempertahankan pertumbuhan laba yang stabil setiap tahunnya.

Berbagai faktor yang penyebab penurunan kinerja ini dapat bervariasi, baik dari internal maupun eksternal, mulai dari akses keuangan yang terbatas, persaingan dengan lembaga keuangan lain, hingga masalah dalam manajemen yang tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memahami akar penyebab dari penurunan kinerja ini dan merancang strategi perbaikan yang sesuai untuk mengoptimalkan peran LPD dalam mendukung perekonomian lokal di Kecamatan Selat. Menurut LPLPD Kabupaten Karangasem banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya kinerja LPD di kecamatan Selat. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tingginya suku bunga yang diterapkan oleh LPD terhadap produk yang ditawarkan, sehingga produk LPD menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank komersial di wilayah tersebut. Selain itu, faktor lainnya meliputi peningkatan jumlah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap LPD. Hal ini tercermin dari kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan administrasi, yang menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk memaksimalkan kontribusi LPD terhadap perekonomian daerah Kabupaten Selat, diperlukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab menurunnya kinerja tersebut dan membuat rencana perbaikan yang sesuai.

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Biaya atau ketidakseimbangan yang diterima LPD atas uang yang diberikan kepada nasabah disebut sebagai suku bunga kredit (Kasmir, 2019). Permintaan kredit sangat dipengaruhi oleh suku bunga kredit. Sebagian besar pendapatan bank secara keseluruhan berasal dari pendapatan bunga dari komponen kredit. Dengan mengoptimalkan tingkat suku bunga kredit, LPD

diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan perusahaannya. Tingkat suku bunga memiliki dampak eksternal terhadap arus masuk dan arus keluar uang. Perubahan suku bunga kredit berdampak besar pada laba bersih LPD. Pendapatan dari bunga kredit yang dihimpun dari nasabah akan meningkat seiring dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, profitabilitas LPD akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian (Sumawati, 2019), variabel suku bunga tidak memiliki dampak yang nyata terhadap profitabilitas LPD Padang Tegal. Hasil penelitian (Swandini, 2021) menunjukkan bahwa variabel suku bunga memiliki dampak yang positif terhadap profitabilitas. Demikian pula halnya dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tegallalang, Gianyar, yang menjadi subjek penelitian (Arta & Kesuma, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kredit bermasalah (NPL) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Salah satu indikator kemampuan manajemen bank dalam menangani kredit bermasalah adalah rasio Kredit Bermasalah (NPL). Pengembalian kredit yang diberikan kepada debitur sering menjadi salah satu faktor risiko yang dihadapi bank. Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang merupakan salah satu kemungkinan penyebabnya (Hasibuan, 2006). Kualitas kredit LPD menurun seiring dengan semakin besarnya persentase Kredit Bermasalah (NPL), sehingga menyebabkan kredit bermasalah dan kerugian meningkat. Di sisi lain, LPD akan semakin untung jika NPL menurun. Berdasarkan hasil penelitian (Antari, 2020), profitabilitas LPD di Kabupaten Gianyar sangat dipengaruhi secara negatif oleh kredit bermasalah dan biaya operasional. Berdasarkan hasil penelitian (Terimajaya, 2023), NPL dan BOPO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ROA LPD di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Lebih jauh lagi, penelitian telah menunjukkan bahwa LDR dan NPL berdampak signifikan dan positif terhadap profitabilitas (Malik, 2020).

Faktor lainnya yang menyebabkan penurunan kinerja LPD adalah rendahnya daya saing antara bank-bank dan lembaga perkreditan desa (LPD). Fenomena ini cukup relevan dalam dunia perbankan, di mana peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia memicu pertumbuhan berbagai lembaga keuangan di seluruh wilayah, termasuk pedesaan (Fatwa, 2016). Saat ini, bank-bank komersial atau konvensional

semakin memperluas cakupan operasionalnya ke wilayah pedesaan. Mereka menawarkan beragam produk dan layanan keuangan dengan tujuan menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Rendahnya daya saing LPD berakibat pada kesulitan mereka dalam mempertahankan relevansi di tengah ekspansi yang sedang gencar-gencarnya dari bank komersial. Bagi bank-bank, kondisi ini mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk guna memperkuat posisi di pasar. Namun, bagi LPD, hal ini menjadi tantangan besar untuk tetap bersaing secara efektif dalam menyediakan layanan keuangan yang mampu menarik masyarakat pedesaan, sambil mempertahankan nilai-nilai lokal dan keberadaan mereka sebagai lembaga berbasis komunitas. Daya saing yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang kurang memadai, serta kurangnya kemampuan dalam melakukan inovasi produk dan promosi.

Dalam konteks tingkat daya saing LPD dengan bank lain di Kecamatan Selat, variabilitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga dapat menjadi faktor penentu profitabilitas LPD. Dalam upaya bersaing, LPD perlu memahami kebutuhan dan permintaan nasabah serta lingkungan bisnisnya, sehingga dapat menyajikan produk dan layanan yang relevan dan menarik bagi nasabahnya. Selain itu, LPD juga perlu memperhatikan tingkat teknologi yang dimilikinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Dari penelitian (Ria Revianty Nevada Korompis et al., 2020) Temuan studi tentang variabel risiko pasar (NIM) memiliki dampak yang signifikan dan sebagian berkorelasi positif dengan profitabilitas (ROA). Lebih jauh, temuan studi tentang tingginya tingkat persaingan perbankan di Indonesia, yang disertai dengan biaya tinggi, menunjukkan bahwa basis pelanggan yang terus bertambah dan penggunaan produk perbankan yang semakin populer telah memungkinkan peningkatan profitabilitas yang signifikan (Putri et al., 2020).

Faktor rendahnya kualitas pencatatan keuangan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi alasan menurunnya kinerja LPD. Sebagai bagian dari lembaga keuangan, LPD memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas ekonominya dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah hasil

dari praktik akuntansi (Wikan et al., 2017). Karena dapat memengaruhi keberhasilan bank, setiap bank tentu mengharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara keuangannya berkualitas tinggi. Menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya konsumen, terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat bergantung pada pelaporan keuangannya. Dengan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan terpercaya, para pemangku kepentingan memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan operasional LPD. Ini menciptakan dasar kepercayaan yang kuat, karena para nasabah merasa yakin bahwa LPD dapat mengelola keuangannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Kepercayaan nasabah terhadap LPD memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan lembaga. Ketika nasabah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap LPD, mereka cenderung lebih setia dan berkomitmen dalam menggunakan layanan keuangan yang ditawarkan. Mereka juga mungkin lebih cenderung untuk menyimpan lebih banyak dana atau menggunakan produk-produk keuangan lain yang ditawarkan oleh LPD. Hal ini berarti LPD dapat meningkatkan pendapatannya melalui bunga tabungan, biaya layanan, dan pendapatan lainnya yang berasal dari kegiatan nasabah. Selain itu, kepercayaan nasabah yang tinggi juga dapat membantu LPD dalam menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Nasabah yang puas dengan layanan dan kinerja keuangan LPD cenderung merekomendasikan LPD kepada orang lain, yang berpotensi meningkatkan jumlah nasabah dan transaksi keuangan. Semakin banyak nasabah yang dilayani oleh LPD, semakin besar pula potensi pendapatan dan profitabilitasnya.

Menurut hasil penelitian (Sri Rahayu et al., 2017) kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh mutu sumber daya manusianya. Dan juga menurut hasil penelitian (Wikan et al., 2017) menunjukkan bagaimana kualitas pelaporan keuangan ditingkatkan secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia. Di LPD Kecamatan Selat memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan adanya karyawan yang masih membuat kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya (LPLPDK Karangasem, 2024). Rendahnya kualitas pencatatan keuangan karyawan LPD di Kecamatan Selat adalah

permasalahan serius yang dapat mempengaruhi kinerja dan profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Para karyawan LPD merupakan salah satu aset terpenting dalam menjalankan operasi harian dan memastikan keberhasilan lembaga keuangan. Namun, ketika karyawan tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mencatat transaksi keuangan dengan benar, hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja keseluruhan LPD. Kualitas pencatatan keuangan yang rendah dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian di antara karyawan, yang pada gilirannya dapat menghambat kerja sama tim dan meningkatkan risiko kesalahan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas bukan hanya menjadi alat untuk memantau kinerja keuangan, tetapi juga merupakan aset strategis yang dapat memperkuat hubungan antara LPD dan nasabahnya. Kepercayaan yang diperoleh dari nasabah melalui laporan keuangan yang transparan dan akurat dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan profitabilitas dan keselamatan keuangan LPD dalam jangka panjang.

Judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **“Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, *Non Performing Loan*, Daya Saing, Dan Kualitas Pencatatan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan LPD Di Kecamatan Selat”**. Dengan memfokuskan pada besaran suku bunga kredit, besaran kredit bermasalah (NPL), tingkat persaingan, dan buruknya kualitas catatan keuangan, penelitian ini berupaya memahami sebab-sebab yang menyebabkan memburuknya kinerja LPD di Kabupaten Selat. Rasio profitabilitas (ROA) akan menjadi metrik utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan LPD. Karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik dan efisien kegiatan LPD menghasilkan pendapatan, maka ROA dipilih. Diharapkan penelitian ini akan menunjukkan cara-cara di mana variabel-variabel ini berinteraksi dan mempengaruhi kinerja LPD Kabupaten Selat. Diharapkan temuan-temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi LPD dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Lebih jauh, diharap hasil-hasil penelitian ini akan memberikan saran-saran atau taktik-taktik bagi LPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan preferensi lembaga-lembaga keuangan mikro di tingkat desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diketahui berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, yaitu:

1. Laba LPD Kecamatan Selat menunjukkan penurunan laba dan fluktuasi asset dalam beberapa periode terakhir, hal ini mengindikasikan bahwa LPD Kecamatan Selat mengalami fenomena penurunan kinerja keuangan.
2. Suku bunga kredit internal LPD adalah faktor yang mempengaruhi permintaan kredit dari nasabah, permintaan kredit yang tinggi dapat meningkatkan laba bersih LPD. Namun, jika suku bunga kredit internal LPD terlalu tinggi, dapat menyebabkan nasabah untuk enggan mengambil kredit dan laba bersih LPD dapat menurun hingga menyebabkan fenomena penurunan kinerja keuangan LPD.
3. Tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* LPD adalah persentase kredit macet. NPL LPD Kecamatan Selat mengalami peningkatan selama beberapa periode terakhir, hal ini menandakan bahwa LPD memiliki banyak kredit bermasalah yang berpotensi merugikan LPD.
4. Semakin banyaknya bank yang membuka cabang di Kecamatan Selat, semakin rendah daya saing yang dimiliki oleh LPD dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Rendahnya daya saing ini dapat memaksa LPD untuk membuat keputusan-keputusan strategis, seperti menurunkan suku bunga kredit, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa LPD harus meningkatkan kualitas layanan dan diversifikasi produk mereka agar mampu bersaing secara efektif dengan bank lain yang memiliki sumber daya lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.
5. Kualitas pencatatan yang baik oleh karyawan dapat membantu LPD dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan laba. Kualitas pencatatan keuangan LPD Kecamatan Selat masih belum optimal, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan berdampak negatif pada kinerja keuangan LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, masalah yang diteliti akan berfokus pada pengaruh suku bunga kredit internal LPD, pengaruh tingkat *non performing loan (NPL)*, hubungan antara tingkat daya saing, dan pengaruh kualitas pencatatan keuangan karyawan terhadap kinerja LPD. Penelitian yang dilakukan ini memiliki ruang lingkup hanya sebatas kinerja keuangan LPD yang diukur menggunakan laba bersih dan asset yang diperoleh LPD pada tahun 2023 dan menggunakan rasio profitabilitas (ROA) sebagai indikator utama untuk menilai kinerja keuangan LPD. Dengan objek penelitian yaitu terpusat di LPD Kecamatan Selat, LPD yang dipilih sebagai sampel adalah LPD yang masih aktif beroperasi. Penelitian ini juga akan membatasi sumber datanya, data yang digunakan adalah data yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian seperti laporan keuangan, hasil kuisisioner dan data jumlah pegawai serta jumlah nasabah LPD.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat suku bunga kredit internal LPD berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Selat?
2. Apakah tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* secara statistik berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Selat?
3. Apakah daya saing LPD dengan Bank Lain dalam hal produk memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja keuangan LPD di Kecamatan Selat?
4. Bagaimana pengaruh rendahnya kualitas pencatatan keuangan karyawan LPD Kecamatan Selat terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Selat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana kinerja keuangan LPD di Kabupaten Selat dipengaruhi oleh tingginya suku bunga kredit internal LPD.
2. Untuk mengkaji secara statistik bagaimana jumlah kredit bermasalah (NPL) mempengaruhi kinerja keuangan LPD di Kabupaten Selat.
3. Untuk mengkaji korelasi yang menarik antara kinerja keuangan LPD Kabupaten Selat dengan daya saingnya dalam hal barang.
4. Untuk mengkaji bagaimana kinerja keuangan LPD Kabupaten Selat dipengaruhi oleh buruknya kualitas data keuangan personalianya.

1.6 Manfaat Penelitian

Baik keuntungan teoritis maupun praktis diharapkan dari penelitian ini. Kedua keuntungan tersebut dapat dijelaskan secara lebih mendalam sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dan keuangan, khususnya dalam bidang konteks pengaruh suku bunga kredit internal LPD, pengaruh tingkat *Non-Performing Loan (NPL)*, hubungan antara tingkat daya saing, dan pengaruh kualitas pencatatan keuangan karyawan terhadap kinerja keuangan di lembaga mikro seperti LPD.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pengaruh suku bunga kredit internal LPD, pengaruh tingkat *Non-Performing Loan (NPL)*, hubungan antara tingkat daya saing LPD, dan pengaruh kualitas pencatatan keuangan karyawan terhadap kinerja keuangan LPD.
3. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam disiplin ilmu yang sama atau yang berdekatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kesempatan untuk berpikir lebih mendalam dan mempelajari lebih lanjut tentang

hubungan antara tingkat daya saing LPD, dampak tingkat pinjaman bermasalah (NPL), dampak kualitas pencatatan keuangan karyawan, dan pengaruh suku bunga kredit internal LPD terhadap kinerja keuangan LPD.

2. Bagi LPD

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan sangat membantu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menentukan unsur-unsur yang memengaruhi kinerja keuangan mereka dan membuat rencana praktis untuk meningkatkannya. Diharapkan bahwa LPD akan memaksimalkan laba bersih mereka dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menerapkan metode yang tepat. LPD akan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada klien mereka dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Akibatnya, nasabah akan dapat memperoleh layanan keuangan yang lebih baik dengan harga yang lebih wajar. Lebih jauh, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu meningkatkan persepsi dan kepercayaan publik terhadap LPD.

3. Bagi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK, untuk merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya peningkatan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan mikro. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan LPD dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian ini juga memiliki potensi untuk menjadi referensi bagi penelitian mendatang tentang LPD dan sektor keuangan mikro secara lebih luas. Penelitian yang berkualitas akan memperkaya pemahaman tentang sektor keuangan mikro dan mendorong pengembangan lebih lanjut di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan saat ini, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan pengetahuan dan kebijakan di masa depan

